**Mantan Kades Banyu Urip Diduga Korupsi Dana Desa**



*Trubus.news*

**Lombok Barat (Inside Lombok) –** Hasil pemeriksaan terkait dugaan kasus penyalahgunaan dana desa (DD) yang dilakukan oleh mantan kades (mandes) Banyu Urip, oleh inspektorat Lombok Barat sudah disampaikan dan diserahkan ke APH (aparat penegak hukum).

Dalam kasus ini, berdasarkan sistem audit secara reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Lombok Barat, mantan kades yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkannya.

“Kalau audit yang secara reguler, yang bersangkutan diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan jumlah dugaan kerugian negara yang diakibatkannya” beber H. Ilham, selaku inspektur inspektorat Lombok Barat, saat ditemui di kantor Bupati Lobar, Rabu (30/09/2020).

Tetapi dalam kasus Banyu Urip ini, disebutkan Ilham bahwa kesempatan yang diberikan kepada yang mantan mades bersangkutan untuk mengembalikan kerugian negara uang diakibatkannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

Sehingga bagaimana kelanjutan penanganan kasus tersebut selanjutnya ada di tangan APH.

“Kalau untuk Banyu Urip itu sudah lewat. Jadi kalau APH membuka kembali penyelidikan maka itu tidak masalah” ketusnya.

Berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh inspektorat Lombok Barat, dugaan penyalahgunaan DD yang ditemukan, ada pada anggaran dana desa tahun 2019 lalu.

“Kita berharap dari Desa yang terkait ada mengembalikan temuan-temuan yang ada di LHP (laporan hasil pemeriksaan) itu” katanya inspektur inspektorat Lobar ini.

Namun hingga saat ini, dirinya mengaku bahwa belum ada informasi yang diterimanya terkait hal tersebut.

“Sesuai dengan standar pemeriksaan, jadi kita memang memeriksa di Banyu Urip. Dan kebetulan waktu itu kami dan APH masuk (memeriksa) bersamaan. Jadi kami diberikan kesempatan untuk memeriksa lebih dulu untuk melalukan pemeriksaan sesuai dengan SOP kita” sebutnya.

Dan untuk saat ini, semua hasil audit yang dilakukan inspektorat telah diserahkan kepada APH. Kemudian bagaimana proses selanjutnya, kata Ilham, itu nantinya akan disesuaikan dengan prosedur pemeriksaan dari APH itu sendiri.

“Apakah APH akan menunggu proses itu lebih lanjut, atau memang ada proses yang lebih ditindaklanjuti oleh mereka. Karena kalau di kita (inspektorat) sudah cukup sampai disitu pemeriksaannya” jelas Ilham.

Ketika disinggung mengenai angka kerugian yang diakibatkan dari dugaan penyalahgunaan DD tersebut, inspektur inspektorat Lobar ini mengaku tidak bisa menyebut jumlahnya secara gamblang.

“Kalau itu saya tidak bisa buka, yang jelas sudah kami berikan ke APH. Kalau dari mereka yang menyebutkan ya silakan” tutupnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/mantan-kades-banyu-urip-diduga-korupsi-dana-desa/> (1 Oktober 2020)
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/11/10/2020/penyidik-polres-lobar-klarifikasi-mantan-kades-banyu-urip/> (11 Oktober 2020)

**Catatan:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Pasal 1 angka 30)
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
17. Tahap III berupa:
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
19. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
20. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
21. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
22. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Lampiran II menjelaskan:

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPDes:
2. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
3. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
4. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
5. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
6. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
7. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa); dan
8. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
9. Perubahan APBDesa Tahun 2020:
10. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
11. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
12. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa; dan
13. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.